



Pemerintah
Kabupaten Gresik

RENCANA KERJA

2024

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
No. 245, Kabupaten Gresik



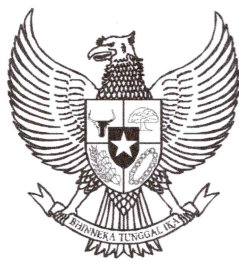
(031) 3952823



www.bkpsdm.gresikkab.go.id

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 57 /HK/437.12/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ *57* /HK/437.12/2023

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2024; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur a. Ketua	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Dani Puspasari, S.Sos., M.Si., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Erna Mufidatul Husna, S.AP., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. 1) Evita Purwandari, S.E., M.Si., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; 2) Ali Miftach, A.Md., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Fatikha Amara Sari, S.T., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Mutasi dan Kepangkatan a. Ketua	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Mutasi dan Kepangkatan; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Mutasi dan Kepangkatan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Ira Kusumaningsih, S.Sos., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Fitriyah Indah Laili, S.E., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Mutasi dan Kepangkatan; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Mutasi dan Kepangkatan; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Mutasi dan Kepangkatan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Mutasi dan Kepangkatan.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. 1) Hasriani, S.STP., M.Si., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Muhammad Awwalu Baqis Shofi, S.STP., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua	Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Pengelola Program dan Laporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik	c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Lintas Sektoral; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua	Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024.

Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini memuat Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2023 berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun lalu serta mengakomodir masukan dari para *stakeholder*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024

Akhir kata, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Gresik, 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Gresik



KHUSAINI, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19670423 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2022	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	30
2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional.....	31
2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	32
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45

DAFTAR ISI

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	54
3.2.1 Tujuan.....	54
3.2.2 Sasaran.....	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	57
 IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 70
 V. PENUTUP	 75
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	75
5.2 Rencana Tindak Lanjut	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022.....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	29
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	36
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	46
Tabel 2.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	61
Tabel 2.8	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	71

RENJA BKPSDM TAHUN 2024

BAB I



KABUPATEN GRESIK



01

LATAR BELAKANG

02

LANDASAN HUKUM

03

**ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

04

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan tujuan. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang memuat kebijakan pembangunan, sasaran, serta uraian program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis dan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 didasarkan pada keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021 – 2026 sesuai Peraturan Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Proses penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 didasarkan pada kebutuhan, penjangkaran aspirasi (bottom up) melalui musyawarah perencanaan pembangunan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang melibatkan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

serta *stakeholders* terkait. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2016.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;

21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/57/HK/437.12/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024;
23. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2024 adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 serta untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja BKPSDM juga sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan disusunnya Renja, dan sistematika penulisan Renja.
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, yang terdiri atas uraian evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap perangkat daerah.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH berisi uraian yang menjelaskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yakni uraian tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH berisi rumusan rencana program dan kegiatan BKPSDM untuk Tahun 2024 serta perkiraan maju pada Tahun 2025.
BAB V	PENUTUP merupakan bab penutup yang berisi simpulan terhadap Renja BKPSDM Tahun 2024

RENJA BKPSDM TAHUN 2024

BAB II



KABUPATEN GRESIK



- 01 **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN
CAPAIAN RENSTRA BKPSDM TAHUN 2022**
- 02 **ANALISIS KINERJA PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**
- 03 **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**
- 04 **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**
- 05 **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN
KEGIATAN MASYARAKAT**

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2022****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 dan
Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2022**

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun dan merupakan kelanjutan dari Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang memuat kebijakan pembangunan, sasaran, serta uraian program, kegiatan, serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis dan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, laporan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan yang baru disahkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2022, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Program atau Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
 - c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - d. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - e. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
2. Realisasi Program atau Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- g. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

- h. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - i. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
 - j. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya, target kinerja program atau kegiatan
- Adanya beberapa Kegiatan atau Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja disebabkan oleh:
- a. Terdapat Sub Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terjadi perubahan peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam proses Rekrutmen PKKK.
 - b. Adanya beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang memerlukan koordinasi intensif dengan instansi lain (BKN, Kemenpan dan RB, Kemendagri, Pemprov Jatim dan lain-lain) sehingga antara perencanaan dan realisasi terkadang tidak sesuai.
 - c. Adanya Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pelaksanaannya bergantung pada kebutuhan dan usulan dari *steakholder*, sehingga di dalam perencanaan yang bersifat asumsi berdasarkan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, misalnya

Penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN (Kenaikan Pangkat), Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS), dan lain-lain.

- d. Terdapat Sub Kegiatan yang pelaksanaannya bergantung pada kebijakan Pimpinan atau Kepala Daerah seperti Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN (Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama).
 - e. Adanya kegiatan dan subkegiatan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, misalnya pelaksanaan diklat-diklat teknis/fungsional, kegiatan-kegiatan bintek.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Berdasarkan pencapaian di atas diketahui bahwa kegiatan yang tidak tercapai atau realisasi kurang dari 100% adalah salah satu kegiatan inti dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM. Pelaksanaan kegiatan promosi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Pelaksanaan promosi merupakan syarat untuk pemenuhan jabatan yang kosong. Dengan tidak terpenuhinya target pelaksanaan promosi sebenarnya berpengaruh pada kebutuhan jabatan yang terisi terutama untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Tahun 2022, terdapat jabatan eselon II yang masih kosong yang sedang dalam proses seleksi terbuka.

Selain pelaksanaan kegiatan promosi, pelaksanaan kegiatan Diklat Analis Kebijakan juga realisasi kurang dari 100%. Hal ini sebetulnya sangat disayangkan, dikarenakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan, membentuk, dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN khususnya bagi para Analis

Kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Peningkatan kompetensi melalui diklat ini juga sangat berpengaruh pada peningkatan Indeks Profesionalitas ASN yang ini juga merupakan amanat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks Profesionalitas ASN ini juga menjadi indikator utama pada Renstra BKPSDM Tahun 2021- 2026. Adanya faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan menjadi fokus yang harus diperhatikan oleh BKPSDM dan selanjutnya dapat memperbaiki kinerja kegiatan sehingga capaian Renja maupun capaian Renstra bisa sesuai dengan yang diharapkan.

5. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai BKPSDM Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang. Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum berhasil berkinerja 100% akan dievaluasi, sehingga seluruh Kegiatan dan Sub Kegiatan akan tercapai 100% pada tahun berikutnya. Adapun Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Koordinasi dengan unit-unit terkait baik unit internal (Seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Gresik) dan unit eksternal (Pemerintah Pusat, BKN, Kemenpan RB, Pemprov Jatim, pihak ke tiga dan sebagainya).

- b. Penyusunan beberapa dokumen peraturan internal kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- c. Penambahan Alokasi Anggaran Khususnya untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pelaksanaan sistem merit.
- d. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi dan pemetaan jabatan.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah disajikan pada table berikut:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022
Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						100%	100%						
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					a. Jumlah Dokumen Renja dan SOP b. Jumlah dokumen perencanaan PD	c. 120 Buah d. 24 Dok	60 Dok	60 Dok	60 Dok	100%	6 Dok	a. 120 Buah b. 6 Dok	62,5%
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					a. Jumlah Laporan SKPD (LKjIP, LPPD, Laporan Monev	a. 55 Buah b. 55 Org c. 48 Lap	a. 25 Buah	25 Buah	25 Buah	100%	12 Laporan	a. 40 Buah b. 30 Org c. 12 Lap	50,6%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
						APBD dan SAKIP) b. Jumlah Peserta Pelatihan <i>Capacity Building</i> c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai dan TPP selama setahun	a. 24 Bulan b. 220 Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	55 Pegawai	a. 24 Bulan b. 55 Pegawai	62,5%
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	72 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	36 Lap	50%
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	204 Lap	24 Lap	36 Lap	36 Lap	100%	36 Lap	96	47%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Triwulan/Semester n SKPD	Semesteran Tahun yang tersusun								
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah ATK b. Jumlah Peralatan Kantor	a. 80 Jenis b. 56 Unit c. 12 Paket	a. 60 Jenis b. 28 Unit	a. 60 Jenis b. 28 Unit	a. 60 Jenis b. 28 Unit	100%	3 Paket	a. 60 Jenis b. 28 Unit c. 3 Paket	75%
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	a. 2.754 Porsi b. 100 Paket	1.150 Porsi	1627 Porsi	346 Porsi	21,3%	23 Paket	a. 1496 Porsi b. 23 Paket	38,7%
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang tersedia selama setahun	a. 38 Jenis b. 49 Paket	18 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	10 Paket	a. 38 Jenis b. 10 Paket	60,2%
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia selama setahun	a. 6 Jenis b. 12 Dok	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Dok	a. 6 Jenis b. 3 Dok	62,5%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana selama setahun	a.220 Kali b.320 Lap	100%	110 Kali	110 Kali	100%	80 Lap	a. 220 Kali b. 80 Lap	62,5%
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non ASN yang dibayar selama setahun	a.8 Org b.16 Lap	4 Org	4 Org	4 Org	100%	4 Lap	a. 8 Org b. 4 Lap	62,5%
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional pada BKPSDM yang terpelihara selama setahun	a.14 Unit b.44 Kendaraan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	11 Kendaraan	a. 14 Unit b. 11 Kendaraan	62,5%
5 03 01 2.09 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara selama setahun	566 Kali	108 Kali	120 Kali	122 Kali	101,6%	73 Kali	303 Kali	53,6%
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah		100%	100%						



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	a. Jumlah Dokumen bezzeting b. Jumlah penerima SK CPNS dan PPPK c. Jumlah peserta bintal CPNS dan PPPK d. Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah e. Jumlah dokumen hasil penyusunan kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan	a. 120 OPD b. 1.537 Org c. 1.537 Org d. 500 Org e. 12 Dok	a.60 OPD b.690 Org c.690 Org d.150 Org	a.60 OPD b.850 Org c.850 Org d.350 Org	a. 60 OPD b. 850 Org c. 850 Org d. 350 Org	100%	3 Dok	a. 120 OPD b. 1.540 Org c. 1.540 Org d. 500 Org e. 3 Dok	85,08%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pengadaan ASN								
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	a. Jumlah OPD yang dimonitoring b. Jumlah ASN yang dibina minat bakat c. Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Rohani d. Jumlah Penyelenggara an HUT KORPRI e. Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	a. 104 OPD b. 60 ASN c. 50 ASN d. 2 Kali e. 4 Lembaga	a. 52 OPD b. 1 Kali	a. 52 OPD b. 60 ASN c. 50 ASN d. 1 Kali	a. 52 OPD b. 23 ASN c. 0 ASN d. 1 Kali	59,5%	1 Lembaga	a. 104 OPD b. 23 ASN c. 0 ASN d. 2 Kali e. 1 Lembaga	52,66%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	a. Jumlah Pemeliharaan Aplikasi b. Jumlah Kegiatan Verifikasi Data Kepegawaian c. Jumlah DOKumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	a. 4 Aplikasi b. 4 Kali c. 8 Dok	a. 2 Aplikasi b. 2 Kali	a. 2 Aplikasi b. 2 Kali	a. 2 Aplikasi b. 2 Kali	100%	2 Dok	a. 4 Aplikasi b. 4 Kali c. 2 Dok	75%
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	a. Jumlah Peserta Tes CPNS, Penyerahan SK Kenaikan Jabatan Fungsional, Jumlah SK Pengangkatan PNS dan Sumpah Janji	a. 2.750 Org b. 50 Kali c. 16 Dok	a.1.043 Org b.4 Kali	a.1.500 Org b.26 Kali	a.494 Org b.4 Kali	24,14%	4 Dok	a.1.537 Org b.8 Kali c. 4 Dok	32,3%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		b. Jumlah Rapat Tim Penilai Kinerja								
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	a. Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat, Jumlah ASN yang menerima SK Pangkat Pengabdian/ SK Pensiun, Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala, Jumlah ASN yang bisa menghitung angka kredit. b. Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat	a. 12.769 Org b. 112 Kali	5.774 Org	6.550 Org	4.500 Org	68,7%	28 Kali	a. 10.274 Org b. 28 Kali	52,75%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Promosi ASN	a. Jumlah hasil uji kompetensi PNS b. Jumlah JPT Pratama yang lowong c. Jumlah Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional	a. 422 Org b. 13 Jabatan c. 12 Kali d. 19 Dok	a. 66 Org b. 9 Jabatan c. 4 Kali	a. 250 Org b. 2 Jabatan c. 6 Kali	a. 250 Org b. 2 Jabatan c. 6 Kali	100%	6 Dok	a. 316 Org b. 11 Jabatan c. 10 Kali d. 6 Dok	68,6%
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	a. Jumlah Peserta Uji Kesehatan bagi Aparatur maupun PNS sakit menahun b. Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	a. 350 Org b. 20 Org	5 Org	205 Org	1 Org	1%	5 Or	a. 6 Org b. 5 Org	13,4%
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah peserta pelatihan penyusunan SKP	a. 250 Org b. 12 Dok	100 Org	150 Org	150 Org	100%	3 Dok	a. 250 Org b. 3 Dok	62,5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Pegawai	Bagi a. Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya b. Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, BPJS, Tapera, dan Klaim JKK-JKM yang dilayani c. Jumlah Peserta Bimtek Purna Tugas d. Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	a. 2.822 Org b. 5.530 Org	458 Org	1.380 Org	1.380 Org	100%	1.330 Org	a.1.838 Org b.1.330 Org	44,6%
5 03 02 2.04 07	Pembinaan ASN	Disiplin a. Jumlah mesin Check Clock yang terpelihara selama setahun	a. 112 Unit b. 6 Paket c. 375 Org	a.56 Unit b.3 Paket	a. 56 Unit b. 3 Paket	a. 56 Unit b. 3 Paket	100%	90 Org	a.112 Unit b.6 Paket c. 90 Org	74,7%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
						b. Jumlah paket Pengadaan Sistem Informasi Apel Berdasarkan Android, Pengembangan Aplikasi SAP, Pengadaan Absensi Berdasarkan Android c. Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan								
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran ASN	Disiplin	a.55 Kasus b.20 Lap	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	100%	5 Lap	a. 60 Kasus b. 5 Lap	67%



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
						b.Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian									
5	04	02				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%						
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	a. Jumlah Peserta Diklat Teknis b. Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembang n kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, PD penunjang, dan urusan	c. 580 Org d. 8 Kali	73 Org	340 Org	340 Org	100%	2 Kali	a. 413 Org b. 2 Kali	48%	



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisas Target Renstra (%)
						pemerintahan umum yang disusun									
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	a. Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, jumlah pelatihan kepemimpinan administrator, dan jumlah pelatihan	2.955 Org	495 Org	490 Org	490 Org	100%	490 Org	1.475 Org	49,9%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kepemimpinan nasional b. Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS c. Jumlah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah								

KABUPATEN GRESIK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 04 02 2.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Tugas Belajar Selama setahun	30 Org	1 Org	5	4	80%	5	10 Org	33,3%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Gresik sebagaimana yang telah di targetkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Tata Kelola Manajemen SDM Aparatur yang Professional dan Berbasis Sistem Merit dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas dan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	50	55	57	60	62	65	53,08	89,73	90	92	Pelaksanaan GREAT ASN (Gresik Satu Data Aparatur Sipil Negara) dan Singkronisasi Aplikasi SIMPEG dengan SIASN memiliki dampak yang besar terhadap capaian Indikator Kompetensi pada penilaian IP ASN Tahun 2023
2	Indeks Sistem Merit	-	-	200 (Kurang Baik)	250 (Baik)	275 (Baik)	300 (Baik)	324 (Baik)	335 (Sangat Baik)	253	-	300	324	Pelaksanaan Penilaian Sistem Merit masih berlangsung hingga akhir Tahun 2023

KABUPATEN GRESIK

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BKPSDM adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka pelayanan kinerja BKPSDM Kabupaten Gresik pada Renja Tahun 2024, aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan : 1 orang
2. Sekretaris Badan : 1 orang
3. Kepala Bidang : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang
5. Fungsional Tertentu : 10 orang
6. Fungsional Umum : 32 orang

2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun permasalahan dalam pelayanan BKPSDM Kabupaten Gresik diantaranya:

1. Indeks Profesionalitas ASN masih rendah
2. Pelaksanaan Manajemen SDM berbasis Sistem Merit masih belum optimal
3. Belum terlaksananya pengembangan karier menggunakan sistem manajemen talenta
4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN bergantung pada instansi penyelenggara
5. Masih sedikitnya pelaksanaan Diklat ASN dikarenakan keterbatasan anggaran

Sedangkan faktor-faktor penghambat:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal

2. Adanya perubahan Kebijakan Nasional, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya
3. Terbatasnya pagu anggaran untuk pelaksanaan diklat
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana (Gedung Diklat Mandiri)

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

BKPSDM Kabupaten Gresik mendukung pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu: **Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Kharimah.**

Terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, BKPSDM Kabupaten Gresik dalam penyusunan Renstra berdasarkan Misi ke-1 yakni: **"Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif"**

Komitmen mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia. Prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif mensyaratkan bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar *good governance* yaitu *civil society* sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, wirausahawan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional, disiplin dan

berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. BKPSDM melalui program, kegiatan dan sub kegiatan berusaha melakukan kinerja manajemen SDM aparatur sebaik-baiknya untuk menghasilkan SDM aparatur yang professional dan akuntabel sehingga mampu mendukung terwujudnya misi tersebut.

Kinerja BKPSDM menjadi salah satu poin dalam 8 area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini menjadi indikator keberhasilan tujuan pembangunan Kabupaten Gresik. Indeks Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat penataan Sumber Daya Manusia juga merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BKPSDM, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, tujuannya untuk mempertajam kebijakan pelayanan BKPSDM untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan pelayanan informasi kepegawaian yang cepat, murah, dan mudah diakses
- b. Peningkatan Pengembangan Kompetensi ASN
- c. Penerapan Manajemen Talenta ASN
- d. Penerapan Konsep *Smart* ASN untuk mewujudkan *World Class Government*

2. Peluang

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- c. Telah tersedianya sistem informasi kepegawaian yang berbasis digital sehingga mempermudah pelayanan kepegawaian
- d. Telah tersedianya Unit Pembantu urusan Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah

Melalui metode analisis SWOT, akan diidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) pada penyelenggaraan pelayanan di BKPSDM Kabupaten Gresik. Adapun hasil analisis menggunakan metode SWOT sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)
 - a. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas
 - b. Dasar hukum yang jelas atas pelaksanaan kegiatan
 - c. Komitmen Atasan yang didukung oleh seluruh pegawai untuk terus melakukan perbaikan
 - d. Koordinasi yang baik antar Bidang dan *Stakeholders*
2. *Weaknesses* (Kelemahan)
 - a. Indeks Profesionalitas ASN masih rendah
 - b. Pelaksanaan Manajemen SDM berbasis Sistem Merit masih belum optimal
 - c. Belum terlaksananya pengembangan karier menggunakan sistem manajemen talenta
 - d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN bergantung pada instansi penyelenggara
3. *Opportunity* (Peluang)
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - c. Telah tersedianya sistem informasi kepegawaian yang berbasis digital sehingga mempermudah pelayanan kepegawaian
 - d. Telah tersedianya Unit Pembantu urusan Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah
4. *Threat* (Ancaman)
- a. Kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dan yang tersedia
 - b. Terbatasnya pagu anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan diklat
 - c. Belum tersedianya sarana dan prasarana (Gedung Diklat Mandiri)

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Rekomendasi berkenaan dengan peran BKPSDM Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan setelah dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati Gresik dan Telaahan Kebijakan Nasional, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN
2. Pemenuhan formasi kebutuhan pegawai melalui pengadaan CPNS dan PPPK
3. Peningkatan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan diklat, bimtek, workshop, atau yang lain
4. Pelaksanaan pelayanan kepegawaian berbasis elektornik
5. Pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta

Berdasarkan rekomendasi di atas, maka strategi BKPSDM dalam mewujudkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik termasuk jabatan fungsional akibat penyetaraan jabatan
2. Melaksanakan manajemen SDM aparatur berbasis sistem merit dan manajemen talenta
3. Meningkatkan kinerja ASN melalui penerapan *Reward and Punishment*
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi dan pemetaan jabatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Tahun 2024 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Renja Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik. Disamping itu juga, Dokumen Renja Tahun 2024 yang disusun ini juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan rencana capaiannya.

Melalui Dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Gresik. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024 merupakan Renja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2024. Adapun *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				22.461.679.645	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				22.461.679.645	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.559.881.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.559.881.000	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				166.221.473	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				166.221.473	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	53.979.569	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	53.979.569	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab, Gresik	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	112.241.904	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab, Gresik	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	112.241.904	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				5.134.696.656	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				5.134.696.656	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Pegawai	5.118.087.801	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Pegawai	5.118.087.801	
4	Koordinasi dan Penyusunan	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir	12 Lap	7.474.008	Koordinasi dan Penyusunan	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir	12 Lap	7.474.008	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	36 Lap	9.134.847	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	36 Lap	9.134.847	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				843.735.012	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				843.735.012	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	273.705.074	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	273.705.074	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	25 Paket	74.733.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	25 Paket	74.733.016	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	149.482.029	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	149.482.029	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kab. Gresik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok	9.135.013	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kab. Gresik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok	9.135.013	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Lap	236.679.880	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Lap	236.679.880	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	1 Dok	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	1 Dok	100.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				141.177.472	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				141.177.472	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	4 Lap	141.177.472	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	4 Lap	141.177.472	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				274.050.387	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				274.050.387	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Gresik	Jumlah kendaraan perorangan dinas	11 Kendaraan	137.025.194	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Gresik	Jumlah kendaraan perorangan dinas	11 Kendaraan	137.025.194	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 Kali	137.025.194	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 Kali	137.025.194	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.396.463.181	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.396.463.181	
	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN				1.760.886.081	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN				1.760.886.081	
15	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	3 Dok	1.314.179.280	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	3 Dok	1.314.179.280	
16	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	242.677.739	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	242.677.739	
17	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	2 Dok	204.029.062	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	2 Dok	204.029.062	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			sistem informasi kepegawaian					sistem informasi kepegawaian			
	MUTASI DAN PROMOSI ASN				2.146.610.436	MUTASI DAN PROMOSI ASN				2.146.610.436	
18	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah	4 Dok	393.677.221	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah	4 Dok	393.677.221	
19	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gresik	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	28 Kali	524.264.809	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gresik	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	28 Kali	524.264.809	
20	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	2 Dok	1.228.668.405	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	2 Dok	1.228.668.405	
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN				841.202.792	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN				841.202.792	
21	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5 Org	41.202.792	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5 Org	41.202.792	
22	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil Pendidikan	1 Dok	50.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil Pendidikan	1 Dok	50.000.000	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			lanjutan ASN yang dikelola					lanjutan ASN yang dikelola			
23	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	1 Dok	500.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	1 Dok	500.000.000	
24	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1 Dok	250.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1 Dok	250.000.000	
	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR				1.647.763.872	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR				1.647.763.872	
25	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dok	279.780.469	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dok	279.780.469	
26	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1.400 Org	966.216.924	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1.400 Org	966.216.924	
27	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	95 Org	337.052.415	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	95 Org	337.052.415	
28	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	5 Lap	64.714.064	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	5 Lap	64.714.064	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.505.335.464	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.505.335.464	
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS				1.413.020.461	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS				1.413.020.461	
29	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Gresik	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	2 Kali	1.413.020.461	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Gresik	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	2 Kali	1.413.020.461	
	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL				8.092.315.003	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL				8.092.315.003	
30	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Kab. Gresik	a. Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan	a.45 Org b.400 Org c. 50 Org	7.839.027.003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Kab. Gresik	a. Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan	d.45 Org e.400 Org 50 Org	7.839.027.003	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengawas, jumlah pelatihan kepemimpinan administrator, dan jumlah pelatihan kepemimpinan nasional b. Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS c. Jumlah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah			Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengawas, jumlah pelatihan kepemimpinan administrator, dan jumlah pelatihan kepemimpinan nasional b. Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS c. Jumlah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah			
31	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang tugas belajar selama setahun	5 Org	253.288.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang tugas belajar selama setahun	5 Org	253.288.000	



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2023	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					

KABUPATEN GRESIK

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah

BKPSDM sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berkewajiban juga menyusun Renja Tahun 2024 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh dari hasil musrenbangcam, musrenbangkab dan data internal BKPSDM. Adapun usulan tersebut dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintah Kabupaten Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	100.000.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN				
2	Pengelolaan Assessment Center	Pemerintah Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	500.000.000	
3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pemerintah Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	50.000.000	
4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pemerintah Kabupaten Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	250.000.000	

RENJA BKPSDM TAHUN 2024

BAB III



KABUPATEN GRESIK



01

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

02

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

03

PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mengacu pada arah pembangunan bidang aparatur negara tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mencakup beberapa arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN dengan strategi meliputi:
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan nasional, pengembangan pola karir nasional, dan pelaksanaan manajemen ASN yang memperhatikan kekhususan daerah dan masyarakat. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui: (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah, (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN, dan (c) Penyusunan pola karir instansional;
 - b. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansi, (b) implementasi arsitektur SPBE instansi, dan (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi;

- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi, (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu, (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan public, (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu, (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan public, (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dan (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D
2. Terwujudnya arsitektur jaringan kerja pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, dengan arah kebijakan penataan proses bisnis internal instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dan institusi pemerintah dengan non-pemerintah serta pelibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, dengan strategi meliputi:
- a. Penataan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (pusat, pusat-daerah, daerah-daerah), intra institusi pemerintah dalam bentuk pemetaan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (*Institutional Mapping*) dan penyusunan SOP strategis per dimensi pembangunan;
 - b. Penguatan mekanisme kerjasama dengan non-pemerintah dalam bentuk pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan;

- c. Pengarusutamaan kebijakan SPBE di seluruh K/L/Pemerintah Daerah.
3. Terwujudnya organisasi yang responsif dan adaptif, dengan arah kebijakan penataan organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional dengan strategi meliputi:
 - a. Penataan organisasi pemerintah berbasis prioritas pembangunan nasional dalam bentuk restrukturisasi desain kelembagaan pemerintah pusat dan daerah (*structure follow strategy*);
 - b. Pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang handal dan efektif, melalui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi serta penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel.
4. Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik, dengan strategi meliputi:
 - a. Pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam pelayanan publik dalam bentuk penguatan penerapan *e-services* dan pemenuhan standar pelayanan publik;
 - b. Pemanfaatan *Big Data* dalam pelayanan publik dalam bentuk optimalisasi pemanfaatan data bersama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik;
 - c. Kerjasama multipihak dalam pelayanan publik yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat dalam bentuk pengembangan kerjasama pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (*coproduction*);

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) dalam bentuk perluasan pelayanan terpadu/terintegrasi;
- e. Peningkatan kualitas kinerja dan pengawasan pelayanan publik dalam bentuk penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik.

Terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola, dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dan tata kelola, yakni:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja organisasi, dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan public berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Selain itu di dalam agenda pembangunan ke-4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan disebutkan bahwa salah satu arah kebijakannya adalah Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter diantaranya melalui Revolusi Mental. Dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup:

1. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya;
2. Penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

Pada Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi bidang aparatur RPJMN diatas, menetapkan visi ***"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN.

Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, yaitu:

1. Profesional

- a. BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah dimanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- b. BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.

2. Bermartabat

- a. BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digaris melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN.
- c. Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip.

Sedangkan pada Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2024, dalam rangka penataan aparatur juga telah menetapkan visi

"Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong", dengan misi :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2024 dibidang kepegawaian adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera

yang dimaksud dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yaitu menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan tingkat kesejahteraan yang cukup yang tidak hanya berupa kompensasi material namun juga non material. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini akan dilihat dari:

1. Indeks Sistem Merit
2. Indeks Profesionalitas ASN

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Renstra 2021-2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah dalam rangka untuk merealisasikan tujuan yang ada dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada dasarnya tujuan BKPSDM Kabupaten Gresik sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten nomor 1 yaitu:

“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance”

Adapun indikator kinerja tujuan adalah:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam mendukung tujuan Kabupaten di atas, BKPSDM Kabupaten Gresik pada Renstra Tahun 2021-2026 telah menetapkan tujuan:

“Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur Berbasis Sistem Merit Berdasarkan Good dan Clean Governance”

Adapun tujuan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan Renstra dengan fokus pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penataan dan Promosi Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai sistem merit;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepegawaian Berbasis *Online*;
3. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Pegawai;
4. Meningkatnya Kompetensi ASN sehingga dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan penetapan sasaran BKPSDM yang tertuang pada Renstra Tahun 2021-2026, BKPSDM Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan sebagai berikut:

“Meningkatnya Sistem Tata Kelola SDM Aparatur yang Profesional dan Berbasis Sistem Merit dalam rangka Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas”

Dengan Indikator :

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Sistem Merit

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan Badan Kepegawaian Negara dengan peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam pedoman tersebut diatur bobot pengukuran setiap dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%) - mengukur kualifikasi Pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;

2. Dimensi Kompetensi (40%) – mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi Kinerja (30%) – mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
4. Dimensi disiplin (5%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Namun demikian karena pada umumnya instansi pemerintah belum melakukan *updating* data pada aplikasi tersebut, maka untuk tahun 2019 pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan data penilaian mandiri yang disampaikan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan secara *offline*. Indeks Profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN.

Adapun Indeks Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM yang diukur dari 9 aspek yaitu: Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, penghargaan dan disiplin; Perlindungan; dan Pelayanan Sistem Informasi. Pengukuran Indeks Sistem Merit berdasarkan pada Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian Mandiri melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dengan mengupload dokumen-dokumen

sesuai Sub Indikator pada indikator aspek yang telah ditentukan. KASN akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen tersebut.

Adapun kategori penilaian Sistem Merit adalah sebagai berikut:

1. Kategori IV, nilai 325 – 400, dengan indeks 0,81 – 1, dengan sebutan Sangat Baik;
2. Kategori III, nilai 250 – 324, dengan indeks 0,61 – 0,8, dengan sebutan Baik;
3. Kategori II, nilai 175 – 249, dengan indeks 0,41 – 0,6, dengan sebutan Kurang;
4. Kategori I, nilai 100 – 174, dengan indeks 0,2 – 0,4, dengan sebutan Buruk.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - b. Pencapaian SDGs
 - c. Pengentasan kemiskinan
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - f. Pengembangan daerah terisolir

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:

BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 merencanakan 3 Program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah dan 2 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan
 - a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Kepegawaian Daerah, terdiri dari 4 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - c) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pengelolaan Promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari 4 Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c) Pembinaan Disiplin ASN
 - d) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan:

- 1) Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - b) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				22.461.679.645				23.846.793.937
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6.559.881.001				7.115.671.000
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				166.221.473				177.939.414
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	6 Dok	53.979.569	APBD		6 Dok	57.784.911
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	12 Lap	112.241.904	APBD		12 Lap	120.154.503
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.134.696.656				5.496.671.984
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima	Kab. Gresik	55 Pegawai	5.118.087.801	APBD		55 Pegawai	5.478.892.271

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		gaji dan tunjangan ASN							
5.03.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Gresik	12 Lap	7.474.008	APBD		12 Lap	8.000.896
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab. Gresik	36 Lap	9.134.847	APBD		36 Lap	9.778.817
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				843.735.012	APBD			974.334.873
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Gresik	3 Paket	273.705.074	APBD		3 Paket	294.499.743
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Gresik	25 Paket	74.733.016	APBD		25 Paket	93.336.383
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan	Kab. Gresik	13 Paket	149.482.029	APBD		13 Paket	160.019.907

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dan penggandaan yang disediakan							
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Gresik	3 Dok	9.135.013	APBD		3 Dok	9.778.994
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Gresik	80 Lap	236.679.880	APBD		80 Lap	266.699.846
	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	Kab. Gresik	1 Dok	100.000.000	APBD		1 Dok	150.000.000
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.177.472	APBD			160.019.907
5.03.01.2.08.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	Kab. Gresik	4 Lap	141.177.472	APBD		4 Lap	160.019.907
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				274.050.388	APBD			306.704.822



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Gresik	11 Kendaraan	137.025.194	APBD		11 Kendaraan	155.574.910
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Gresik	80 Kali	137.025.194	APBD		90 Kali	151.129.912
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.396.463.180	APBD			7.016.175.310
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN				1.760.886.081	APBD			1.970.517.040
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kab. Gresik	3 Dok	1.314.179.280	APBD		3 Dok	1.434.716.066



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Kab. Gresik	1 lembaga	242.677.739	APBD		1 lembaga	314.491.876
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Gresik	2 Dok	204.029.062	APBD		2 Dok	221.309.098
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				2.146.610.435	APBD			2.303.643.284
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksanan dan mutasi ASN antar daerah	Kab. Gresik	4 Dok	393.677.221	APBD		4 Dok	425.146.425
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Gresik	28 Kali	524.264.809	APBD		28 Kali	551.612.926
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Kab. Gresik	2 Dok	1.228.668.405	APBD		5 Dok	1.326.883.933

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				841.202.792	APBD			841.202.792
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Kab. Gresik	5 Org	41.202.792	APBD		5 Org	41.202.792
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	Kab. Gresik	1 Dok	50.000.000	APBD		1 Dok	50.000.000
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	1 Dok	500.000.000	APBD		1 Dok	500.000.000
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	Kab. Gresik	1 Dok	250.000.000	APBD		1 Dok	250.000.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.647.763.872	APBD			1.900.812.194
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Gresik	3 Dok	279.780.469	APBD		3 Dok	302.145.158
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Kab. Gresik	1.400 Org	966.216.924	APBD		1.400 Org	1.164.784.725

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pebinaan disiplin	Kab. Gresik	95 Org	337.052.415	APBD		95 Org	363.995.227
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Gresik	5 Lap	64.714.064	APBD		5 Lap	69.887.084
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.505.335.464	APBD			9.714.947.627
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				1.413.020.461	APBD			1.512.632.624
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan	Kab. Gresik	2 Kali	1.413.020.461	APBD		2 Kali	1.512.632.624

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pemerintahan umum yang disusun							
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				8.092.315.003	APBD			8.202.315.003
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	a. Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, jumlah pelatihan kepemimpinan administrator, dan jumlah pelatihan kepemimpinan nasional b. Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS c. Jumlah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah	Kab. Gresik	a. 45 Org b. 400 Org c. 50 Org	7.839.027.003	APBD		a. 45 Org b. 400 Org c. 50 Org	7.949.027.003
5.04.02.2.02.07	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah ASN yang tugas belajar selama setahun	Kab. Gresik	5 Org	253.288.000	APBD		5 Org	253.288.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan								

KABUPATEN GRESIK

RENJA BKPSDM TAHUN 2024

BAB IV



KABUPATEN GRESIK



**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra BKPSDM serta untuk mendukung tercapainya tujuan BKPSDM pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Gresik pada Umumnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:



Tabel 2.8

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran	
					2024	2025
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.155.514.376	23.593.505.937
5.03	KEPEGAWAIAN				14.559.263.576	14.131.846.310
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.260.131.046	7.115.671.000
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				61.956.970	177.939.414
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	28.033.100	57.784.911
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	33.923.870	120.154.503
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.051.600.076	5.496.671.984
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Pegawai	7.045.686.276	5.478.892.271
5.03.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Lap	3.413.900	8.000.896
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	36 Lap	2.499.900	9.778.817
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.720.273.000	974.334.873
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	150.675.300	294.499.743
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket	66.969.000	93.336.383



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran	
					2024	2025
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	103.277.300	160.019.907
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kab. Gresik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok	9.135.000	9.778.994
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Lap	714.004.000	266.699.846
	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	1 Dok	676.212.400	150.000.000
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.581.000	160.019.907
5.03.01.2.08.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	4 Lap	216.581.000	160.019.907
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				209.720.000	306.704.822
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Kendaraan	189.730.000	155.574.910
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 Kali	19.990.000	151.129.912
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.299.132.530	7.016.175.310
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				894.419.130	1.970.517.040
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	3 Dok	817.419.130	1.434.716.066
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	14.999.900	314.491.876



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran	
					2024	2025
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2 Dok	62.000.100	221.309.098
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				954.646.600	2.303.643.284
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah	4 Dok	207.545.900	425.146.425
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gresik	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	28 Kali	247.100.800	551.612.926
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	2 Dok	499.999.900	1.326.883.933
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				2.993.662.500	841.202.792
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5 Org	41.202.600	41.202.792
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	1 Dok	876.216.900	50.000.000
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 Dok	165.043.000	500.000.000
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1 Dok	1.911.200.000	250.000.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				456.404.300	1.900.812.194
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dok	47.078.600	302.145.158
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1.400 Org	335.841.200	1.164.784.725



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran	
					2024	2025
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	95 Org	58.241.200	363.995.227
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	5 Lap	15.243.300	69.887.084
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.596.250.800	9.461.659.627
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.596.250.800	9.461.659.627
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				1.413.020.400	1.512.632.624
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Gresik	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	2 Kali	1.413.020.400	1.512.632.624
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.183.230.400	7.949.027.003
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Gresik	a. Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, jumlah pelatihan kepemimpinan administrator, dan jumlah pelatihan kepemimpinan nasional b. Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS c. Jumlah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah	a. 45 Org b. 400 Org c. 50 Org	2.183.230.400	7.949.027.003

RENJA BKPSDM TAHUN 2024

BAB V



KABUPATEN GRESIK



BAB V

PENUTUP

Sebagai kesimpulan pada Bab Penutup Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian khususnya kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Dengan ditetapkannya Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, selanjutnya akan dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2024 melalui Rapat Forum SKPD, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024;
3. Dengan ditetapkannya Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan BKPSDM Kabupaten Gresik dapat mempelajari untuk selanjutnya dijadikan acuan dan arahan operasionalisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 akan dijadikan dasar penyusunan Renja Tahun 2025 dan salah satu bahan pengukuran dan evaluasi kinerja serta menjadi dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2022;
2. Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 diharapkan dapat membangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk konsisten dalam perencanaan pembangunan untuk kebaikan bersama.

